

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT DAN
UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**Nama : Rara Iis Datia
Nim : 222017199**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI AKUNTANSI
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT DAN
UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Rara Iis Datia
Nim : 222017199**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI AKUNTANSI
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rara Iis Datia
NIM : 222017199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarja strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Februari 2021



Rara Iis Datia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Rara Lis Datia
NIM : 222017199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2021

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

Pembimbing II,



M. Fahmi, S.E., M.Si
NIDN: 0029097804

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“jangan pernah menyerah dan putus asa, sesungguhnya berserta kesulitan itu pasti ada kemudahan dan ingat petolongan allah itu pasti bagi hambanya yang Bersabar serta jangan lupa minta doa kedua orang tua”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku*
- ❖ Adikku*
- ❖ Keluarga besarku*
- ❖ Pembimbingku*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamaterku*
- ❖ PK IMM FEB UMP*

PRAKATA

“Bismillahirrahmanirrahim”

Alhamdulillah rabbi'l'alaamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)” sebagai syarat untuk mencapai gelar Starta satu pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka dan hipotesis, bab metode penelitian, bah hasil penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi penulis sadari tanpa bantuan, saran dan dorongan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana seharusnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu tercurahkan kepada penulis, dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis ucapkan kepada ibunda Nurhawati, Ayahanda Edi Alamsyah, adinda Arba Rhamadan Akbar serta keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan,

mendukung dan memberikan bantuan moril dan materil selama ini sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku pembimbing akademik.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang .
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang .
6. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat yaitu Mutiara Fransiska, Silvi, Atlantis Team, terkhusus Grup Santri “Vinni Pricilia, Rmania, dan Adinda Febriantika”, dan teman-teman seperjuangan penulis lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

7. Mbak-mbakku yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Rara Iis Datia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	17
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
a. Pengertian Laporan Keuangan	17

b. Tujuan Laporan Keuangan	18
c. Komponen Laporan Keuangan	19
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	22
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	22
d. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
3. Ukuran Pemerintah Daerah	25
a. Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah	25
b. Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah	26
4. Opini Audit	26
a. Pengertian Opini Audit	26
b. Pengukuran Opini Audit	27
5. Ukuran Legislatif	34
a. Pengertian DPRD	34
b. Fungsi DPRD	35
c. Tugas dan Wewenang DPRD.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	36
C. Keterkaitan Antar Variabel	48
D. Hipotesis.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	54

C. Operasionalisasi Variabel.....	54
D. Populasi dan Sampling	55
E. Data Yang Diperlukan.....	58
F. Metode Pengumpulan Data	59
G. Analisis Data Data Teknik Analisis	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	68
1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Bengkulu	68
a. Sejarah Singkat dan Tata Letak Geografis	68
b. Visi dan Misi	69
c. Demografis	71
2. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	71
a. Sejarah Singkat dan Tata Letak Provinsi Sumatera Selatan	71
b. Visi dan Misi	72
c. Demografis	74
B. Hasil Pengelolaan Data	75
1. Statistik Deskriptif.....	75
2. Uji Asumsi Klasik	77
a. Uji Normalitas	77
b. Uji Multikolinearitas	78
c. Uji Heteroskedasitas.....	79
d. Uji Autokolerasi	80

3. Uji Hopotesis.....	81
a. Analisis Linear Berganda.....	81
b. Uji Koefisien Determinasi	83
c. Uji Parsial (Uji T).....	84
C. Pembahasan Hasil Penelitian	87
1. Uji Parsial (Uji T).....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Total Aset, Opini Audit, Jumlah Anggota DPRD, dan Rasio Efektifitas pada provinsi Bengkulu	6
Tabel I.2	Total Aset, Opini Audit, Jumlah Anggota DPRD dan Rasio Efektifitas pada provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel II.1	Rasio Efektifitas	25
Tabel II.2	Skala Pengukuran Opini Audit	34
Tabel II.3	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	44
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	54
Tabel III.2	Daftar Populasi Kabupaten atau Kota Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.....	56
Tabel III.3	Daftar Sampel Kabupaten atau Kota Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.....	57
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota Provinsi Bengkulu	71
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan	74
Tabel IV.3	Hasil Statistik Deskriptif	75
Tabel IV.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	78
Tabel IV.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	80
Tabel IV.6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	81
Tabel IV.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi	83
Tabel IV.8	Hasil Uji Parsial	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	51
Gaabar IV.1 Hasil Uji Normalitas.....	77
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Yang Diperlukan
- Lampiran 2 Output SPSS
- Lampiran 3 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Fotocopy Abstrak
- Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek
- Lampiran 7 Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 8 Fotocopy Plagiarism
- Lampiran 9 Sertifikat Yang dimiliki
- Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Rara Iis Datia/222017199/2021/Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Ukuran Legislaif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pmerintah daerah, opini audit dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian yag digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah 27 kabupaten/kota di provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, metode sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa LKPD tahun 2015-2018. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda, serta pengolahan data penelitian ini menggunakan program komputer satistik SPSS 22.0 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial (Uji T) Ukuran pemerintah daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. .


Kata Kunci: Ukuran pemerintah daerah, opini audit, ukuran legislatif dan kinerja keuangan pemerintah daerah

ABSTRACK

Rara Iis Datia / 222017199/2021 /The effect of local government size, audit opinion and legislative size on the financial performance of local governments

This study aims to determine the effect of local government size, audit opinion and legislative size on the financial performance of local governments in the districts or cities of Bengkulu Province and the districts or cities of South Sumatera Province. The type of research used in this research was associative research. The numbers of the population in this research were 27 districts or cities in the Province of Bengkulu and South Sumatera. The sampel technique method used was purposive samping. The data used was secondary data of Local Government Financial Reports in 2015-2018. The method of collectionthe data used was documentation. The analysis method used was descriptive, satistical analysis method, classical assumption test, and multiple linear regressions. The data processing of this research used was a statistical computer program of SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 22. The results of this study indicated that partially (Test T) the local government size and audit opinion has no effected the financial performance of local governments, while the legislative size affected the financial performance of local governments.

Keyword: Local government size, audit opinion, legislative size and local government financial performance

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A45	Rara Iis Datia	222017199	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang baik pada penyelenggaraan pemerintah maka kinerja keuangan pemerintah daerah harus ditingkatkan juga.

Setiap entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dari kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) (Moermahadi, 2017: 1). Pelaporan keuangan pemerintah merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah pertanggungjawaban tersebut (Bahtiar dan Muchlis, 2009: 289). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Muindro, 2008: 30).

Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran atau representasi posisi keuangan dan transaksi-transaksi pada pemerintah untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah Sumarjo (2010). Karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah yang di proksikan total aset, opini audit yang diukur menggunakan IHPS, ukuran legislatif yang diukur dengan jumlah anggota DPRD dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas.

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja juga bisa fokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome. (Ihyaul Ulum, 2009: 19). Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 4).

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio efektivitas karena rasio efektivitas menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Bisa juga dilihat dari tujuan lahirnya otonomi daerah yaitu untuk kemakmuran masyarakat daerah yang pelaksanaannya dengan cara memberikan daerah kewewenangan yang lebih luas dan nyata serta bertanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ihyaul Ulum, 2009 : 31).

Size pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Pengukuran *Size* pemerintah dalam penelitian ini menggunakan total aset pemerintah daerah. Kecenderungannya semakin besar total aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka akan semakin baik pula rasio efektivitas yang dimiliki pemerintah daerah sebaliknya semakin kecil total aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka akan semakin kecil juga rasio efektivitas yang dimiliki pemerintah daerah.

Opini audit adalah keniscayaan yang harus diberikan oleh auditor setelah masa penugasan audit berakhir. Opini audit memberikan keyakinan memadai bagi pemangku kepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan klien tentang keandalan laporan keuangan (Arum, 2018: 187). Menurut (Mulyadi, 2014: 20-22) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor: 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*uniquelified Opinion*), 2)

pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), 3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*), 4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*), dan 5) pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion report*). Opini audit kecenderungannya semakin baik hasil opini audit atau mendapatkan opini audit WTP (wajar tanpa pengecualian) maka akan semakin besar rasio efektivitas pemerintah daerah, sebaliknya semakin buruk opini audit pemerintah daerah atau mendapatkan opini audit WDP (wajar dengan pengecualian, TW (tidak wajar, TMP (tidak memberikan pendapat) maka semakin rendah rasio efektivitas pemerintah daerah.

Menurut UUD Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah (Windhu, 2018: 46. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Markus, 2009 : 169).

Dalam pemerintah daerah kecenderungannya semakin banyak anggota DPRD dalam suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar rasio efektivitas yang dimiliki pemerintah daerah, sebaliknya semakin sedikit anggota DPRD dalam suatu pemerintah daerah maka akan semakin kecil rasio efektivitas yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Ukuran legislatif dalam penelitian ini ditunjukkan dengan jumlah anggota legislatif atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota provinsi Bengkulu.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh I Gusti dan Priyo (2018) yang berjudul pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah, dan temuan audit terhadap kinerja keuangan daerah, mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama hal dengan penelitian yang dilakukan Risma, Prayitno dan Alamsyah (2015) yang berjudul pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dwi dan Yunita (2019) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putu dan Ni Made (2016) yang berjudul pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan Endri (2017) yang berjudul pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa opini pemeriksaan memiliki pengaruh

positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priyan (2017) yang berjudul pengaruh opini audit dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Vegy dan Vanica (2019) yang berjudul pengaruh good government governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, hasil penelitiannya menyatakan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Indah (2016) yang berjudul pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel I.1
Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Jumlah DPRD dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten di Provinsi Bengkulu	Tahun	Ukuran Pemerintah Daerah	Opini Audit	Jumlah DPRD	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efektivitas)
1	Kab. Bengkulu Selatan	2015	1.079.066.485.946,91	WDP	25	72%
		2016	1.183.127.839.599,21	WDP	25	113%
		2017	1.200.289.370.993,76	WDP	25	105%
		2018	1.220.558.889.229,22	WDP	25	114%

2	Kab. Bengkulu Tengah	2015	948.034.050.545,91	WTP	25	120%
		2016	1.106.806.272.227,95	WDP	25	132%
		2017	1.182.520.352.257,84	WDP	25	98%
		2018	1.251.627.320.958,49	WDP	25	93%
3	Kab. Bengkulu Utara	2015	2.270.486.552.567,79	WDP	30	84%
		2016	1.446.156.382.709,85	WDP	30	106%
		2017	1.536.604.402.869,60	WTP	30	105%
		2018	1.611.320.910.558,04	WTP	30	100%
4	Kab. Kaur	2015	1.011.399.669.901,13	WDP	25	85%
		2016	1.219.395.859.977,54	WTP	25	103%
		2017	1.213.034.619.433,09	WDP	25	75%
		2018	1.237.205.533.104,90	WDP	25	79%
5	Kab. Kepihang	2015	1.043.962.936.668,90	WTP	25	84%
		2016	1.090.132.992.353,52	WDP	25	102%
		2017	1.154.799.874.871,65	WDP	25	90%
		2018	1.214.275.007.121,00	WTP	25	93%
6	Kab. Lebong	2015	1.353.818.008.009,95	WDP	25	78%
		2016	1.527.931.920.444,98	WTP	25	75%
		2017	1.549.041.509.406,12	WTP	25	98%
		2018	1.561.519.231.664,47	WTP	25	80%
7	Kab. Mukomuko	2015	1.281.428.828.177,12	WDP	25	96%
		2016	1.454.764.579.535,33	WDP	25	138%
		2017	1.543.746.416.698,05	WTP	25	102%

		2018	1.641.014.609.269,58	WTP	25	88%
8	Kab. Rejang Lebong	2015	1.405.158.859.073,95	WDP	30	89%
		2016	1.473.467.273.080,75	WDP	30	95%
		2017	1.487.750.860.802,14	WDP	30	94%
		2018	1.531.698.262.256,51	WTP	30	90%
		2016	1.329.113.706.485,69	WDP	30	98%
9	Kab. Seluma	2017	1.414.719.445.374,68	WDP	30	86%
		2018	1.526.212.944.041,35	WDP	30	85%
		2015	1.596.427.099.061,39	WDP	45	79%
10	Kota Bengkulu	2016	1.789.395.397.317,02	WDP	45	88%
		2017	1.920.228.815.812,52	WDP	45	97%
		2018	1.984.896.760.605,15	WTP	45	95%

Sumber : <http://www.djpk.kemenuki.go.id>, <http://www.bpk.go.id>, dan <https://sumsel.bps.go.id/>.

Dari tabel diatas bisa ditemukan fenomena untuk ukuran pemerintah daerah pada kota Bengkulu tahun 2016 yang memiliki total aset yang tinggi tetapi rasio efektivitasnya rendah atau kurang efektif, berbanding terbalik pada kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016, 2017 dan 2018 yang memiliki total aset yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi atau sangat efektif. Hal ini berarti bahwa tidak semua pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang tinggi juga, begitu pun sebaliknya tidak semua pemerintah daerah yang memiliki total aset yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.

Untuk fenomena opini audit bisa dilihat pada kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki opini audit WDP (wajar dengan pengecualian) tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, berbanding terbalik pada kabupaten Kepihang tahun 2018, kabupaten Lebong tahun 2016-2018, kabupaten Mukomuko tahun 2018, kabupaten Rejang Lebong tahun 2018, dan kota Bengkulu tahun 2018 yang memiliki opini audit WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi memiliki rasio efektivitas yang rendah. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak semua pemerintah daerah yang memiliki opini audit WTP (wajar tanpa pengecualian) memiliki rasio efektivitas yang tinggi, begitu pun sebaliknya tidak semua pemerintah daerah yang memiliki opini audit WDP (wajar dengan pengecualian) memiliki rasio efektivitas yang rendah, hal ini bisa ditemukan

Fenomena untuk ukuran legislatif bisa dilihat pada kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki jumlah anggota DPRD yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, berbanding terbalik pada kota Bengkulu yang memiliki anggota DPRD yang banyak tetapi memiliki rasio efektivitas yang rendah. Hal ini bahwa tidak semua pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang banyak memiliki rasio efektivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya tidak semua pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.

Tabel I.2
Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Jumlah DPRD dan Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan	Tahun	Ukuran Pemerintah Daerah (dalam jutaan rupiah)	Opini Audit	Jumlah DPRD	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
1	Kab. Banyuasin	2015	3.759.574.880.995,70	WTP	45	101%
		2016	3.936.076.034.892,84	WTP	45	86%
		2017	3.853.437.150.101,13	WTP	45	114%
		2018	4.049.248.750.619,71	WTP	45	116%
2	Kab. Lahat	2015	2.636.999.350.690,64	WTP	40	108%
		2016	2.772.653.655.148,05	WTP	40	101%
		2017	2.820.959.504.400,29	WTP	40	47%
		2018	2.856.418.876.322,47	WTP	40	91%
3	Kab. Muara Enim	2015	4.381.953.622.572,24	WTP	45	97%
		2016	4.616.358.748.719,00	WTP	45	91%
		2017	4.817.775.319.177,79	WTP	45	81%
		2018	5.078.067.884.927,25	WTP	45	102%
4	Kab. Musi Banyuasin	2015	6.814.157.098.330,52	WTP	45	87%
		2016	7.564.834.177.844,69	WTP	45	87%
		2017	7.512.423.614.971,62	WTP	45	92%
		2018	8.353.874.228.228,76	WTP	45	99%
5	Kab. Musi Rawas	2015	3.462.645.651.478,79	WDP	40	98%
		2016	3.432.745.888.994,12	WTP	40	86%
		2017	3.430.062.571.512,92	WTP	40	84%
		2018		WTP	40	86%

			3.941.875.496.734,12			
6	Kab. Musi Rawas Utara	2015	669.480.754.007,46	WDP	40	116%
		2016	1.546.749.290.686,48	WDP	40	110%
		2017	1.663.177.092.967,12	WTP	40	97%
		2018	1.864.851.692.819,07	WTP	40	84%
7	Kab. Ogan Ilir	2015	2.176.935.549.470,88	WDP	40	26%
		2016	2.251.240.807.347,95	WTP	40	30%
		2017	1.927.767.856.283,98	WTP	40	31%
		2018	2.093.955.907.157,37	WTP	40	30%
8	Kab. Ogan Komering Ilir	2015	3.178.140.312.460,41	WTP	45	75%
		2016	3.314.522.960.390,80	WTP	45	94%
		2017	3.472.076.141.816,90	WTP	45	49%
		2018	3.768.092.450.326,01	WTP	45	84%
9	Kab. Ogan Komering Ulu	2015	3.281.774.681.733,62	WTP	35	92%
		2016	2.595.601.870.566,10	WTP	35	107%
		2017	2.775.949.175.900,13	WTP	35	114%
		2018	3.023.833.387.813,58	WTP	35	84%
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2015	2.278.856.405.960,99	WTP	40	93%
		2016	2.276.494.013.725,57	WTP	40	84%
		2017	2.603.838.658.815,30	WTP	40	98%
		2018	2.778.115.237.399,94	WTP	40	84%
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2015	1.644.832.134.825,72	WTP	45	121%
		2016	2.009.546.443.360,30	WTP	45	112%
		2017	2.066.501.980.770,54	WTP	45	105%
		2018	2.244.042.008.097,82	WTP	45	111%
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2015	855.166.635.434,22	WDP	25	55%
		2016	1.219.508.339.645,20	WTP	25	75%

		2017	1.730.654.689.047,66	WDP	25	64%
		2018	2.403.430.647.148,28	WTP	25	96%
13	Kota Lubuklinggau	2015	2.221.375.915.221,08	WTP	30	98%
		2016	2.300.506.409.743,75	WTP	30	66%
		2017	2.332.191.204.158,50	WTP	30	79%
		2018	2.421.662.223.474,72	WTP	30	83%
14	Koata Pagar Alam	2015	1.662.530.014.509,32	WTP	25	104%
		2016	1.863.162.822.686,58	WTP	25	100%
		2017	2.081.971.197.075,13	WTP	25	99%
		2018	2.120.901.383.260,11	WTP	25	110%
15	Kota Palembang	2015	6.391.429.764.324,20	WTP	50	98%
		2016	7.493.109.764.659,61	WTP	50	93%
		2017	13.546.667.486.999,30	WTP	50	99%
		2018	14.360.384.701.026,00	WTP	50	87%
16	Kota Prabumulih	2015	2.440.907.402.219,35	WTP	25	79%
		2016	2.514.674.680.393,04	WTP	25	89%
		2017	2.433.101.819.745	WTP	25	92%
		2018	2.451.694.251.549	WTP	25	105%

Sumber : <http://www.djpk.kemenku.gi.id>, <http://www.bpk.go.id>, dan <https://sumsel.bps.go.id/>.

Dari tabel diatas bisa ditemukan fenomena untuk variabel ukuran pemerintah daerah pada kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 dan 2016 yang memiliki total aset yang besar tetapi memiliki asio efektivitas yang rendah, berbanding terbalik pada kota Pagar Alam yang memiliki total aset yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitass yang tinggi. Hal ini bahwa tidak semua pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi memiliki rasio efektifitas

yang tinggi, begitu pun sebaliknya tidak semua pemerintah daerah yang memiliki total aset yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah

Fenomena pada variabel opini audit bisa ditemukan pada kabupaten Lahat tahun 2017, kabupaten Muara Enim tahun 2017, kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 dan 2016, kabupaten Musi Rawas tahun 2015-2018, kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2018. dan masih banyak kabupaten lainnya yang mendapatkan opini audit WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi rasio efektivitasnya rendah, berbanding terbalik pada kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015-2016, yang memiliki opini audit WDP (wajar dengan pengecualian) tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi.

Fenomena untuk variabel ukuran legislatif bisa dilihat pada Ogan Ilir yang memiliki jumlah anggota DPRD yang banyak tetapi memiliki rasio efektivitas yang rendah, berbanding terbalik pada kota Pagar Alam yang memiliki anggota DPRD yang sedikit tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi. Hal ini berarti tidak semua pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang banyak memiliki rasio efektivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya tidak semua pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah,

Secara umum tugas DPRD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan kesejahteraan masyarakat semakin baik, sebaliknya pengelolaan keuangan yang buruk akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang buruk, oleh karena itu

pemerintah daerah harus benar dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk terciptanya kinerja yang baik, dengan kinerja yang baik maka kesejahteraan masyarakat akan semakin baik pula.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah ilmu dan wawasan yang baru tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan bukti empiris yang ada tentang pengaruh pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2. Manfaat bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan jadi bahan kajian ilmu dan menambah pengetahuan dan referensi untuk adik-adik yang akan melakukan penelitian pengaruh ukuran pemerinta daerah, opini audit, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Ardianingsih (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Asmaul Aziz (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis*, 11 (1) : 1907-7513.
- Bahtiar arif, Muchlis dan Iskandar (2009). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media.
- Dewi Sari (2020). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (Februari 2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9 (2) : 2087 – 4669.
- Endri Parwanto dan Puji Harto (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6 (1) : 1-9.
- Freddy Poernomo (2020). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jawa Timur : Airlangga University Press.
- Hendro Sumarjo (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. Disertasi tidak diterbitkan. Surakarta : Pascasarjana UNS.
- I Gusti Made Ary Anggara Tama dan Priyo Hari Adi (2018, Oktober). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1 (1) : 91-113.
- Indah Puspa Sari (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3 (1).
- Indra Batian (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.
- Irhan Fahmi (2011). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

- Ihyaul Ulum M.D (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Juliansyah (2011). *Metode Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi 1). Jakarta : Prenadamedia Grup.
- M. Ramli Faud. (2016) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Cetakan 1). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Marhawai (Januari 2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014). *JTRA (Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi)*, 8 (1) : 49-58.
- Markus Gunawan (2008). *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif* (DPR, DPRD, & DPD). Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.
- Mulyadi (2014). *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muindro Renyowijoyo (2018). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakrata : Mitra Wacana Media.
- Nur dan Kiswanto (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5 (1) : 2252-6765.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Putu Riesty Masdiantini¹ dan Ni Made Adi Erawati (2016 Februari). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ke makmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2) : 1150-1182.
- Priyan Mardya Kusuma (juni 2017) . Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Equity*, 20 (1) : 51-66.
- Romie Priyastama (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS : Pengelolaan dan Analisis*. Yogyakarta : Start Up
- Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (April 2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7 (1) : 27-34.
- Uma Sekaran & Roger Bougie (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi Buku Pertama). Jakarta : Salemba Empat.
- Uma Sekaran & Roger Bougie (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 6). Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. *Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara*.
- Vegy Gustianra1 dan Vanica Serly (Agustus 2019). Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Terdapat Pada *Indonesia Governance Indexs* Tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1 (3) : 1426-1442.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pusta Baru Press.
- Windhu Putra (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.